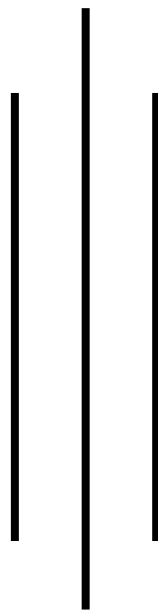




PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2021**



PER 31 DESEMBER 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
(CaLK)**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAMPIRAN
VERIFIKASI LAPORAN
OPERASIONAL (LO)



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAMPIRAN
MEMO PENYESUAIAN




PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN
Jalan Raya Pasirian No. 142 Telp./Faxes.(0334) 571003
PASIRIAN 67372

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2021 yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Operasional (LO); (3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (4) Neraca; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lumajang, 31 Desember 2021

CAMAT PASIRIAN

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
Pernyataan Tanggung Jawab	i
Daftar Isi	ii
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
2. Laporan Operasional	
3. Laporan Perubahan Ekuitas	
4. Neraca	
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	6
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD	8
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD	8
2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program	9
2.3 Posisi Keuangan	12
2.4 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	13
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	15
3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	15
3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca	22
a. Aset	22
b. Kewajiban	28
c. Ekuitas	31
3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	31
a. Beban	31
b. Surplus (Defisit) LO	33
3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN	37
BAB V PENUTUP	44

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran (Rincian LRA)
- Lampiran 6 : Register Surat Tanda Setoran (STS) UP/TU/GU Tahun 2021
- Lampiran 7 : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2021
- Lampiran 8 : SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2021
- Lampiran 9 : Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran (Mulai 1 Januari S/D 31 Desember 2021)
- Lampiran 10 : Fotocopy Rekening Koran (RC) Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2021
- Lampiran 11 : Register SPP/SPM/SP2D (Mulai 1 Januari S/D 31 Desember 2021)
- Lampiran 12 : Buku Pembantu Panjar Bendahara Pengeluaran
- Lampiran 13 : Buku Pembantu Kas Tunai Bendahara Pengeluaran
- Lampiran 14 : Buku Pembantu Simpanan Bank Bendahara Pengeluaran
- Lampiran 15 : Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran
- Lampiran 16 : Berita Acara Stock Opname Persediaan Dan Lampiran Persediaan Per 31 Desember 2021
- Lampiran 17 : Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Semester I Dan Semester 2 Tahun 2021
- Lampiran 20 : Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Tahun 2021
- Lampiran 21 : Daftar Mutasi Barang Tahun 2021
- Lampiran 22 : Daftar Aset Lain-Lain Tahun 2021
- Lampiran 23 : Daftar Aset Tidak Berwujud Tahun 2021
- Lampiran 24 : Daftar Barang Ekstrakomtabel 2021
- Lampiran 25 : Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB A-F)
- Lampiran 26 : Berita Acara Akumulasi Penyusutan Semester 1 Dan Semester 2 Tahun 2021
- Lampiran 27 : Kertas Kerja Penyusutan Tahun 2021
- Lampiran 28 : Daftar Hutang Belanja Tahun 2021
- Lampiran 30 : Daftar Piutang
- Lampiran 32 : Buku Jurnal Pengeluaran Kas
- Lampiran 33 : Kertas Kerja Verifikasi Laporan Operasional
- Lampiran 34 : Memo Penyesuaian Dan Pendukungnya

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Tersusunnya Laporan Akhir Tahun ini merupakan informasi Kinerja keuangan Kecamatan Pasirian yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja keuangan selama kurun waktu satu tahun. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian Laporan Akhir Tahun Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2021 ini disusun. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Laporan Akhir Tahun ini. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Lumajang, 31 Desember 2021

CAMAT PASIRIAN



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2021

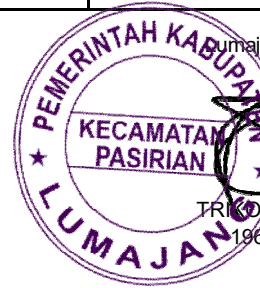
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
01	PENDAPATAN				
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
03	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	0.00	0.00	0.00	0.00
08					
09	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Dana Bagi Hasil Cukai	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Dana Alokasi khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	0.00	0.00	0.00	0.00
17					
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
19	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	0.00	0.00	0.00	0.00
22					
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	0.00	0.00	0.00	0.00
28					
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
30	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)	0.00	0.00	0.00	0.00
34	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	0.00	0.00	0.00	0.00
35					
36	BELANJA				
37	BELANJA OPERASI				
38	Belanja Pegawai	1,230,678,699.00	1,229,054,325.00	99.87	0.00
39	Belanja Barang	598,578,734.00	596,939,790.00	99.73	0.00
40	Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Bantuan Keuangan Partai Politik	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	1,829,257,433.00	1,825,994,115.00	99.82	0.00
46					
47	BELANJA MODAL				
48	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Belanja Peralatan dan Mesin	49,070,560.00	48,655,200.00	99.15	0.00

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
50	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	49,070,560.00	48,655,200.00	99.15	0.00
56	BELANJA TAK TERDUGA				
57	Belanja Tak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	0.00	0.00	0.00	0.00
59	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	1,878,327,993.00	1,874,649,315.00	99.80	0.00
60					
61	<u>TRANSFER</u>				
62	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
63	Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
64	Bagi Hasil Retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
66					
67	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	0.00	0.00	0.00	0.00
68	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	1,878,327,993.00	1,874,649,315.00	99.80	0.00
69					
70	SURPLUS/DEBIT (33 - 65)	(1.878.327.993,00)	(1.874.649.315,00)	99.80	0.00
71					
72	<u>PEMBIAYAAN</u>				
73					
74	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
75	Penggunaan SILPA	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
82	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00
86	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
87	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	0.00	0.00	0.00	0.00
88					
89	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
90	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
91	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Pembayaran Utang Belanja Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
101	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	0.00	0.00	0.00	0.00
102	PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)	0.00	0.00	0.00	0.00
103					
104	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(67 + 99)	(1.878.327.993,00)	(1.874.649.315,00)	99.80	0.00



Lumajang, 31 Desember 2021
Kepala SKPD

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
19670916 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

NERACA

KECAMATAN PASIRIAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	0.00	0.00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
7	Kas di BLUD	0.00	0.00
8	Kas Lainnya	0.00	0.00
9	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
10	Piutang Pajak	0.00	0.00
11	Piutang Retribusi	0.00	0.00
12	Biaya di bayar di muka	0.00	0.00
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00
18	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00
19	Piutang Lainnya	0.00	0.00
20	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
21	Persediaan	582,230.00	133,000.00
22	RK SKPD	0.00	0.00
23	Total Aset Lancar		133,000.00
24	INVESTASI JANGKA PANJANG		
25	Investasi Nonpermanen		
26	Pinjaman Jangka Panjang	0.00	0.00
27	Obligasi	0.00	0.00
28	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00
29	Invstasi Nonpermanen Lainnya	0.00	0.00
30	Total Investasi Nonpermanen	0.00	0.00
31	Investasi Permanen		
32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00
33	Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00
34	Total Investasi Permanen	0.00	0.00
35	Total Investasi Jangka Panjang	0.00	0.00
36			
37	ASET TETAP		
38	Tanah	336,746,667.00	336,746,667.00
39	Peralatan dan Mesin	991,865,500.00	943,210,300.00
40	Gedung dan Bangunan	1,443,670,000.00	1,443,670,000.00
41	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
42	Aset Tetap Lainnya	3,500,000.00	4,000,000.00
43	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
44	Akumulasi Penyusutan	-1,182,562,987.00	-1,078,779,097.50
45	Total Aset Tetap	1,593,219,180.00	1,648,847,869.50
46			
47	DANA CADANGAN		
48	Dana Cadangan	0.00	0.00
49	Total Dana Cadangan	0.00	0.00
50			

No	Uraian	2021	2020
51	ASET LAINNYA		
52	Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00
53	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00	0.00
54	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
55	Aset Tak Berwujud	0.00	0.00
56	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00
57	Aset yang dibatasi penggunaannya	0.00	0.00
58	Aset Lain-lain	88,767,500.00	88,767,500.00
59	Piutang Jangka Panjang	0.00	0.00
60		88,767,500.00	88,767,500.00
61	TOTAL SELURUH ASET	1,682,568,910.00	1,737,748,369.50
62			
63	KEWAJIBAN		
64			
65	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
66	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
67	Utang Bunga	0.00	0.00
68	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
69	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
70	Utang Lain	0.00	0.00
71	Utang Belanja	29,638,925.00	36,140,349.00
72	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	29,638,925.00	36,140,349.00
73			
74	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
75	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0.00	0.00
76	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00
77	Premium (Diskonto) Obligasi	0.00	0.00
78	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
79	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
80	JUMLAH KEWAJIBAN	29,638,925.00	36,140,349.00
81			
82	Ekuitas	1,701,608,020.50	1,701,608,020.50
83	RK PPKD	0.00	0.00
84	JUMLAH EKUITAS DANA	1,701,608,020.50	1,701,608,020.50
85	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,731,246,945.50	1,737,748,369.50



Lumajang, 31 Desember 2021
Kepala KECAMATAN PASIRIAN

RIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN PASIRIAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2021 DAN TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	%
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Dana Alokasi khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Jumlah Pendapatan Transfer	0.00	0.00	0.00	0.00
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Pendapatan Hibah Aset	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Pendapatan Dana BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Pendapatan Dana Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00
35	JUMLAH PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	0.00
36					
37	<u>BEBAN</u>				
38	Beban Pegawai	1,222,557,401.00	0.00	1,222,557,401.00	0.00
39	Beban Barang dan Jasa	596,986,060.00	0.00	596,986,060.00	0.00
40	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Beban Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Beban Transfer	0.00	0.00	0.00	0.00

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	%
45	Beban Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Beban Penyusutan	103,783,889.50	0.00	103,783,889.50	0.00
47	Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
49					
50	JUMLAH BEBAN	1,923,327,350.50	0.00	1,923,327,350.50	0.00
51					
52	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.923.327.350,50)	0.00	(1.923.327.350,50)	0.00
53					
54	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
55	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Surplus Penghapusan Aset Non Lancar	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0.00	0.00	0.00	0.00
58	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
60	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
61					
62	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
63					
64	<u>POS LUAR BIASA</u>				
65	Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	0.00
67	POS LUAR BIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
68					
69	SURPLUS/DEFISIT - LO	(1.923.327.350,50)	0.00	(1.923.327.350,50)	0.00

Lumajang, 31 Desember 2021
Kepala SKPD



TRIKUNDO CAHYONO, S.Sos
1670916 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN PASIRIAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	1,701,608,020.50	1,786,662,195.10
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.923.327.350,50)	(2.421.933.633,60)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.00	0.00
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0.00	0.00
6	LAIN-LAIN	0.00	0.00
	RK - PPKD	1,874,649,315.00	2,336,879,459.00
8	EKUITAS AKHIR	1,652,929,985.00	1,701,608,020.50

**BERITA ACARA
EVALUASI DAN VERIFIKASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO :	
BAGIAN BULAN :	Desember

Pada hari ini 13 Januari 2022 bertempat di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang telah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi atas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah KECAMATAN PASIRIAN Tahun Anggaran 2021 tersaji sebagai berikut:

No	Uraian	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				JUMLAH s/d BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH s/d BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	PENDAPATAN						
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
03	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08							
09	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
10	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15							
16	BELANJA						
17	BELANJA OPERASI						
18	Belanja Pegawai	1.353.308.454,00	1.230.678.699,00	1.146.450.082,00	82.604.243,00	1.229.054.325,00	1.624.374,00
19	Belanja Barang dan Jasa	723.499.976,00	598.578.734,00	539.409.090,00	57.530.700,00	596.939.790,00	1.638.944,00
20	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jumlah Belanja Operasi	2.076.808.430,00	1.829.257.433,00	1.685.859.172,00	140.134.943,00	1.825.994.115,00	3.263.318,00
25							
26	BELANJA MODAL						
27	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.070.560,00	49.070.560,00	48.655.200,00	0,00	48.655.200,00	415.360,00
29	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jumlah Belanja Modal	49.070.560,00	49.070.560,00	48.655.200,00	0,00	48.655.200,00	415.360,00
34							
35	JUMLAH BELANJA	2.125.878.990,00	1.878.327.993,00	1.734.514.372,00	140.134.943,00	1.874.649.315,00	3.678.678,00
36							
37	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.125.878.990,00	1.878.327.993,00	1.734.514.372,00	140.134.943,00	1.874.649.315,00	3.678.678,00
38							
39	SURPLUS/DEFISIT	(2.125.878.990,00)	(1.878.327.993,00)	(1.734.514.372,00)	(140.134.943,00)	(1.874.649.315,00)	(3.678.678,00)
40							
41	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(2.125.878.990,00)	(1.878.327.993,00)	(1.734.514.372,00)	(140.134.943,00)	(1.874.649.315,00)	(3.678.678,00)

Lumajang, 13 Januari 2022

Bidang Akuntansi Pelaporan
BPKD Kabupaten Lumajang
Petugas Evaluasi dan Verifikasi LRA



MUHAMMAD AFIF RAMADHAN
NIP.

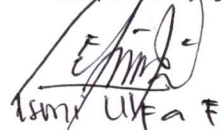
Mengetahui,
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
BPKD Kabupaten Lumajang



REYLIA OLIVIASARI, SE
NIP. 19770510 200604 2 038

Pembantu Pejabat Akuntansi

Kabupaten Lumajang



Bidang Akuntansi Pelaporan
BPKD Kabupaten Lumajang
Ka.Sle Terkait



FARIS KHOIRUL F.
NIP. 19820412 200903 1 008

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



BAB I PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - y. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 - z. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - aa. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- kk. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- 2.1 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
- 3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

a. Beban

b. Surplus (Defisit) LO

3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Pasirian Tahun 2021 sebagai berikut.

A. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Kecamatan Pasirian meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan belanja modal meliputi belanja peralatan dan mesin.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.829.257.433	1.825.994.115	99,82%	3.263.318
2	Belanja Modal	49.070.560	48.655.200	99,15%	415.360
	Jumlah Belanja	1.878.327.993	1.874.649.315	99,80%	3.678.678

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.2
Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 - 2021

Belanja	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	352.495.559	1.313.266.780	1.602.178.031	1.554.761.685	1.229.054.325
Belanja Barang	755.319.550	881.457.500	1.072.119.450	730.082.774	596.939.790
Belanja Modal	176.465.000	131.980.000	46.750.000	48.775.000	48.655.200
Jumlah	1.284.280.109	2.326.704.280	2.721.047.481	2.333.619.459	1.874.649.315
% Kenaikan/ Penurunan		81%	17%	-14,24%	-19,67%
		(Naik)	(Naik)	(Turun)	(Turun)

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan Realisasi Anggaran pada tahun 2018 meningkat 81% karena adanya belanja pegawai tambahan penghasilan PNS - Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kegiatan Koordinasi dan Audiensi Masyarakat.

Perkembangan Realisasi Anggaran pada tahun 2019 meningkat 17% karena adanya kenaikan upah bulanan tenaga kerja bulanan Kantor Kecamatan Pasiruan.

Perkembangan Realisasi Anggaran pada tahun 2020 menurun 14,24% karena adanya *selfblocking* dan pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami perubahan nilai anggaran.

Perkembangan Realisasi Anggaran pada tahun 2021 menurun 19,67% karena adanya *refocusing* dan pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami perubahan nilai anggaran.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Tabel 2.3
Realisasi Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Tahun 2021

Program/Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.599.253.993	1.595.575.315	3.678.678	99,77%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	880.000	880.000	0	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	880.000	880.000	0	100,00%

Program/Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.231.052.449	1.229.428.075	1.624.374	99,87%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.225.428.999	1.223.804.625	1.624.374	99,87%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.249.700	5.249.700	0	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	373.750	373.750	0	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.659.560	51.373.200	286.360	99,45%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	982.600	982.600	0	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.408.960	24.207.600	201.360	99,18%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.688.000	5.688.000	0	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.580.000	20.495.000	85.000	99,59%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.070.560	48.655.200	415.360	99,15%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.070.560	48.655.200	415.360	99,15%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.070.924	216.740.240	1.330.684	99,39%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.180.924	28.616.300	564.624	98,07%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.810.000	188.043.940	766.060	99,59%

Program/Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.000	80.000	0	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.520.500	48.498.600	21.900	99,95%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	0	100,00%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.520.500	30.498.600	21.900	99,93%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.084.000	13.084.000	0	100,00%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.084.000	13.084.000	0	100,00%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.150.000	3.150.000	0	100,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.934.000	9.934.000	0	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	1.800.000	1.800.000	0	100,00%

Program/Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
PEMERINTAHAN UMUM				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.800.000	1.800.000	0	100,00%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.800.000	1.800.000	0	100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	264.190.000	264.190.000	0	100,00%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	264.190.000	264.190.000	0	100,00%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	264.190.000	264.190.000	0	100,00%
JUMLAH	1.878.327.993	1.874.649.315	3.678.678	99,80%

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca Kecamatan Pasirian terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Posisi keuangan Kecamatan Pasirian selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d. 2021

Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Aset	2.057.017.520,24	1.910.325.000,95	1.827.781.507	1.737.748.369,50	1.682.568.910,00
2. Kewajiban	2.544.200,00	38.081.809,00	41.119.312	36.140.349,00	29.638.925,00
3. Ekuitas	2.054.473.320,34	1.872.243.191,95	1.786.662.195,10	1.701.608.020,50	1.701.608.020,50
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	2.057.017.520,24	1.910.325.000,95	1.827.781.507	1.737.748.369,50	1.731.246.945,50

2.4 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya Pemahaman Aparatur Terhadap Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Barang Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan

seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah Sistem Pengendalian Intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Kecamatan Pasirian, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup belanja yang dilaksanakan Kecamatan Pasirian.

Tabel 3.1 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 dan 2020

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
Belanja Daerah	2.364.072.517	2.333.619.459	1.878.327.993	1.874.649.315

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 mencapai 99,80% dari anggaran Rp. 1.878.327.993,- . Dibandingkan Tahun Anggaran 2020 yang mencapai 98,71% dari anggaran sebesar Rp. 2.364.072.517,- .

Belanja daerah meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dan 2020

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1) Belanja Operasi	2.315.222.517	2.284.844.459	1.829.257.433	1.825.994.115

Belanja operasi pada SKPD Kecamatan Pasirian terdiri dari Belanja Pegawai Dan Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	1.230.678.699,00	1.229.054.325,00	99,87	1.554.761.685,00
2	Belanja Barang dan Jasa	598.578.734,00	596.939.790,00	99,73	730.082.774,00
	Jumlah	1.829.257.433,00	1.825.994.115,00	99,82	2.284.844.459,00

Belanja pegawai meliputi pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai dan belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Pasirian. Rincian realisasi Belanja Pegawai sebagai berikut.

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021

RINCIAN BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI 2021 (Rp.)	%	REALISASI 2020 (Rp.)
Gaji dan Tunjangan	828.643.429	827.019.059	99,80%	1.088.320.946
Gaji pokok PNS / uang representasi	630.770.524	629.597.100	99,81%	835.367.600
Tunjangan keluarga	78.947.014	78.802.128	99,82%	106.477.156
Tunjangan jabatan	52.709.999	52.660.000	99,91%	71.035.000
Tunjangan fungsional umum	16.615.000	16.540.000	99,55%	20.530.000
Tunjangan beras	43.611.326	43.524.420	99,80%	47.217.840
Tunjangan PPh/tunjangan khusus	720.621	700.624	97,23%	834.272
Pembulatan gaji	8.547	6.547	76,60%	10.578
Iuran jaminan kecelakaan kerja	1.320.165	1.297.053	98,25%	6.848.500
Iuran jaminan kematian PNS	3.940.233	3.891.187	98,76%	
Tambahan Penghasilan PNS	396.785.570	396.785.566	100,00%	450.240.739
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	396.785.570	396.785.566	100,00%	450.240.739

RINCIAN BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI 2021 (Rp.)	%	REALISASI 2020 (Rp.)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.249.700	5.249.700	100,00%	450.240.739
Honorarium PNS	5.249.700	5.249.700	100,00%	15.522.000
Jumah Belanja Pegawai	1.230.678.699	1.229.054.325	99,87%	1.554.761.685

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi Belanja Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Persediaan	71.970.910,00	71.769.550,00	99,72%	118.873.800,00
2	Belanja Jasa	477.850.924,00	476.520.240,00	99,72%	490.218.474,00
3	Belanja Pemeliharaan	32.016.900,00	31.995.000,00	99,93%	36.290.500,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	16.740.000,00	16.655.000,00	99,49%	84.225.000,00
5	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00%	475.000,00
Jumlah		598.578.734,00	596.939.790,00	99,73%	730.082.774,00

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.71.769.550,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2021

Kode Akun	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.503.600	16.503.600,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.507.110	1.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.091.850	21.897.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.945.750,00	6.945.750,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	810.000,00	810.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	982.600,00	982.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.130.000,00	23.130.000,00
JUMLAH		71.970.910,00	71.769.550,00

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; dan belanja lainnya yg bersifat jasa. Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 476.520.240,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021

Kode Akun	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	402.000.000,00	402.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	2.756.200,00

Kode Akun	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.560.000,00	1.488.100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.600.924,00	15.597.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan	9.020.000,00	8.775.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.760.000,00	1.760.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.200.000,00	23.787.600,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.210.000,00	856.951,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.500.000,00	1.499.389,00
JUMLAH		477.850.924,00	476.520.240,00

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti Peralatan Dan Mesin; Gedung Dan Bangunan; dan Aset Tetap Lainnya. Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 31,995,000,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021

Kode Akun	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14016900	13.995.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.800.000,00	9.800.000,00

Kode Akun	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.200.000,00	5.200.000,00
JUMLAH		32.016.900,00	31.995.000,00

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 16.655.000,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021

Kode Akun	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.900.000,00	3.815.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.840.000,00	12.840.000,00
JUMLAH		16.740.000,00	16.655.000,00

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Belanja Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu Nihil.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
2) Belanja Modal	49.070.560	48.655.200	48.775.000

Belanja modal Tahun 2021 Kecamatan Pasirian meliputi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin. Realisasi dan rincian Belanja Modal tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi dan Rincian Belanja Modal Tahun 2021

No.	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
1	Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor				16.500.000
2	Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use)	14.446.080	14.316.800	99,11%	22.300.000
3	Belanja modal peralatan personal komputer	17.468.000	17.323.700	99,17%	9.975.000
4	Belanja modal personal komputer	17.156.480	17.014.700	99,17%	
JUMLAH		49.070.560	48.655.200	99,15%	48.775.000

Berdasarkan tabel 3.10, Realisasi Tahun Anggaran 2020 lebih besar dari Tahun 2021. Hal ini dikarenakan terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang lebih besar seperti belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor, belanja modal home use, dan belanja modal peralatan personal komputer.

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

A. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya dibayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel 3.11 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1. Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
2. Persediaan	582.230,00	133.000,00
Jumlah	582.230,00	133.000,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.12 Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 dan 2020

1	Saldo 31 Desember 2020		0
2	Penerimaan :		
	- SP2D UP	25.000.000	
	- SP2D TUP	71.162.500	
	- SP2D GU	115.955.890	
	- Penerimaan PFK	0	
	Jumlah Penerimaan		212.118.390
3	Pengeluaran :		
	- SPJ UP/GU/TU	207.057.090	
	- Setor kembali sisa TUP	609.700	
	- Setor kembali sisa UP/GU	4.451.600	
	- Pengeluaran PFK	0	
	Jumlah pengeluaran		212.118.390
4	Saldo 31 Desember 2021		0

Lampiran 5 : Rekap UP/TU/GU Tahun 2021

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
2) Persediaan	582.230	133.000

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian diukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 3.13 Laporan Persediaan Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Persediaan per 31 Desember 2020		133.000
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		-
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		133.000
4	Ditambah :		
5	Belanja Persediaan LRA 2021		71.769.550
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)		-
7	Belanja Persediaan BOS		-
8	Penerimaan hibah persediaan		-
9	Dikurangi :		
10	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2020	-	
11	Pengeluaran persediaan	-	
12	Jumlah tambahan persediaan bersih (10+11)	-	
13	Jumlah persediaan yang siap digunakan	-	
14	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)	71.320.320	
15	Persediaan tahun 2021		582.230

Lampiran 9 : Daftar mutasi persediaan Tahun 2021

Tabel 3.14 Daftar Persediaan Akhir Tahun 2021 dan 2020*dalam rupiah*

No	Persediaan	2021	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	582.230	133.000
2	Persediaan Barang cetakan	-	-
3	Persediaan Perangko	-	-
4	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	-	-
5	Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	-	-
6	Bahan Pakai Habis Lainnya	-	-
	Jumlah	582.230	133.000

Berdasarkan tabel 3.14 tentang Daftar Persediaan Akhir Tahun 2021 dan Tahun 2020, masih ada persediaan alat tulis kantor senilai Rp. 582.230,- pada tahun 2021. Hal ini disebabkan masih ada 1 pack Amplop No. 104, 1 dus kertas HVS F4 Folio 70 Gsm dan 1 botol Tinta Printer 664 Epson. Sedangkan Tahun 2020 saldo persediaan sebesar Rp. 133.000,- berupa 1 rim HVS dan 1 botol Tinta Printer.

B. ASET TETAP

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Aset Tetap	1.593,219.180	1.648.847.869,50

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kecamatan Pasirian meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah Kecamatan Pasirian disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.

- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari. Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.16

Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi	Mutasi		Saldo Akhir
		1 Januari 2021		Bertambah	Berkurang	31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	336.746.667,00	-	0	0	336.746.667,00
2	Peralatan dan Mesin	943.710.300,00	-	48.655.200,00	500.000,00	991.865.500,00
3	Gedung dan Bangunan	1.443.670.000,00	-	0	0	1.443.670.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	-	0	-	3.500.000,00
5	Akumulasi Penyusutan	-1.078.779.097,50	-	103.783.889,50	0	-1.182.562.987,00
	Jumlah	1.648.847.869,50	-	-55.128.689,50	500.000,00	1.593.219.180,00

Rincian mutasi penambahan kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- Penambahan Aset Tetap sebesar Rp 48.655.200,- meliputi Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- Beban Penyusutan sebesar Rp. 103.783.889,50 pada Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan.

Rincian mutasi pengurangan kelompok Aset tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

- a) Pengurangan Aset tetap sebesar Rp. 500.000,- dari Peralatan dan Mesin dikarenakan terjadi reklas ke Aset Ekstrakomtable dengan jenis barang Peralatan Tenis.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Tanah	336.746.667,-	336.746.667,-

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 336.746.667,- terinci sebagai berikut :

**Tabel 3.17 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah
per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Kantor Kecamatan Pasirian	336.746.667,-	0	0	0	336.746.667,-

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	991.865.500	943.210.300

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 991.865.500,- dan Rp. 943.210.300,- terinci sebagai berikut :

**Tabel 3.18 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam rupiah)**

No	Peralatan dan mesin	Saldo 31 Des 2020	Kor eksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	6	7	8
1	Alat Besar	25.590.000	-	-	-	25.590.000

No	Peralatan dan mesin	Saldo	Kor eksi	Mutasi		Saldo
		31 Des 2020		Bertambah	Berkurang	31 Des 2021
1	2	3	4	6	7	8
2	Alat Angkutan	238.221.000	-	-	-	238.221.000
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	655.999.450		24.316.800	255.247.500	425.068.750
4	Alat Studio, Komunikasi, dan pemancar	23.399.850		-	10.000.000	13.399.850
5	Komputer			289.585.900		289.585.900
	Jumlah	943.210.300	-	313.902.700	265.247.500	991.865.500

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021 mengalami beberapa kondisi sebagai berikut :

- Pada aset tetap alat kantor dan rumah tangga bertambah Rp.24.316.800,- dikarenakan terjadi pembelian aset tetap alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.14.316.800,- dan reklas dari alat studi, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp. 10.000.000,- .
- Pada aset tetap alat kantor dan rumah tangga berkurang sebesar Rp.255.247.500,- dikarenakan terjadi reklas ke aset tetap komputer.
- Pada aset tetap alat studi, komunikasi, dan pemancar berkurang sebesar Rp. 10.000.000,- karena terjadi reklas ke aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- Pada aset tetap komputer bertambah sebesar Rp. 289.585.900,- dikarenakan terjadi pembelian aset tetap komputer sebesar Rp.34.338.400,- dan reklas dari aset tetap alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 255.247.500,- .

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<i>(c) Gedung dan Bangunan</i>	1.443.670.000,-	1.443.670.000,-

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan monumen. Pada SKPD Kecamatan Pasirian, Aset Tetap Gedung dan Bangunan hanya pada Bangunan Gedung Kantor saja senilai Rp. 1.443.670.000,- . Pada tahun 2021 tidak terjadi perubahan nilai aset tetap gedung dan bangunan.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(d) Aset Tetap Lainnya	3.500.000,-	4.000.000,-

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.500.000,- terjadi pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp. 500.000,- dikarenakan reklas ke aset ekstrakomtable – peralatan olahraga berupa peralatan tenis 2 (dua) buah. Aset Tetap Lainnya pada SKPD Kecamatan Pasirian berupa barang bercorak kesenian / kebudayaan sebanyak 35 buah.

C. ASET LAINNYA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Aset Lainnya	88.767.500,00	88.767.500,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 88.767.500,00 tidak penambahan maupun pengurangan.

D. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban SKPD Kecamatan Pasirian per 31 Desember 2021 dan 2019 berupa utang Belanja yang masuk dalam Kewajiban Jangka Pendek.

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	36.140.349	29.638.925

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 36.140.349,00 dan Rp. 29.638.925,00. Kewajiban jangka pendek tersebut adalah utang belanja.

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
(a) Utang Belanja	36.140.349	29.638.925

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal. Saldo utang belanja Per 31 Desember 2021 terdiri dari utang Belanja Jasa dan Utang Belanja Pegawai tercatat sebesar Rp 29.638.925,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.20 Rincian Utang Tahun 2021 (dalam rupiah)

No	Jenis Utang	31-Des-20	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31-Des-21
1	Utang Belanja pegawai	35.049.349	28.552.425	35.049.349	28.552.425
2	Utang Belanja Jasa	1.091.000	1.086.500	1.091.000	1.086.500
	Jumlah	36.140.349	29.638.925	36.140.349	29.638.925

Berdasarkan tabel diatas, Utang Belanja Pegawai Kecamatan Pasirian pada 31 Desember 2020 yaitu Rp. 35.049.349,- dan telah dibayarkan pada tahun 2021 serta ada penambahan utang belanja pegawai sebesar Rp. 28.552.425,- yang menjadi utang belanja pegawai tahun 2021.

Utang Belanja Jasa Kecamatan Pasirian pada 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.091.000,- dan telah dibayarkan pada tahun 2021 serta ada

penambahan/peningkatan utang belanja jasa senilai Rp. Rp. 1.086.500,- yang menjadi utang belanja jasa tahun 2021.

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp.28.552.425,- merupakan kewajiban atas Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan Beban Kerja PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi.

Terdapat pengurangan utang belanja pegawai pada tahun 2020 yaitu pembayaran utang belanja pegawai pada utang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan Beban Kerja PNS.

Tabel 3.21 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020

No	Jenis Utang	31-Des-20	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31-Des-21
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	35.049.349	28.552.425	35.049.349	28.552.425
	Jumlah	35.049.349	28.552.425	35.049.349	28.552.425

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.086.500,00 kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian Telepon, Air PDAM, Internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.22 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Jenis Utang	31-Des-20	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31-Des-21
1	Jasa Internet	231.000	230.400	231.000	230.400

No	Jenis Utang	31-Des-20	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31-Des-21
3	Jasa telepon	128.000	124.100	128.000	124.100
4	Jasa Air PDAM	732.000	732.000	732.000	732.000
	Jumlah	1.091.000	1.086.500	1.091.000	1.086.500

E. EKUITAS

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Ekuitas	1.652.929.985	1.701.608.020,50

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.22 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Akun	31-Des-20	31-Des-21
1	Jumlah Aset	1.737.748.369,50	1.682.568.910
2	Jumlah Kewajiban	36.140.349,00	29.638.925
3	Ekuitas (1-2)	1.701.608.020,50	1.652.929.985

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

b. BEBAN

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	1.222.557.401	1.551.331.800

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai yang menjadi kewajiban SKPD Kecamatan Pasirian tahun 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabe 3.23 Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

NO.	Uraian	2021	2020
1	Belanja Pegawai LRA	1.229.054.325	1.554.761.685
2	Utang Belanja Pegawai 2021	28.552.425	35.049.349
	Pembayaran Utang Belanja Pegawai 2020	35.049.349	38.479.234
	Mutasi Keluar	-	1.760.000
3	Jumlah (1+2)	1.257.606.750	1.589.811.034
4	Dikurangi UBP (n-1) Tahun	1.222.557.401	1.551.331.800

Beban Pegawai-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.222.557.401,- yang didapatkan dari Jumlah Belanja Pegawai LRA + Utang Belanja Pegawai tahun Berjalan dikurangi pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun n-1 sebesar Rp. 35.049.349,- .

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	596.986.060	730.310.696

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.24 Perhitungan Beban Barang dan Jasa (dalam rupiah)

No.	Barang dan Jasa	Beban
1	BEBAN PERSEDIAAN = (Belanja Persediaan + Persediaan Awal - Persediaan Akhir) = 71.769.550 + 133.000 – 582.230	71.320.320

No.	Barang dan Jasa	Beban
2	BEBAN JASA KANTOR = (Belanja Jasa - Pembayaran UBJ 2020 + UBJ 2021) = 476.520.240 – 1.091.000 + 1.086.500	476.515.740
3	BEBAN PEMELIHARAAN	31.995.000
4	BEBAN PERJALANAN DINAS	16.655.000
5	BEBAN LAINNYA	500.000
	Jumlah	596.986.060

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3) Beban Penyusutan	103.783.889,50	118.695.899,50

Beban penyusutan yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban penyusutan Peralatan dan Mesin; Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan. Beban Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tab 3.25 Perhitungan Beban Penyusutan Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

Uraian	2021	2020
1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	74.333.585,00	89.245.595,00
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.450.304,50	29.450.304,50
Jumlah	103.783.889,50	118.695.899,50

c. SURPLUS (DEFISIT) LO

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	(1.923.327.350,50)	(2.421.933.633,60)

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 3.26 Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2021	2020
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(1.923.327.350,50)	(2.400.338.395,50)
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	0,00	(21.595.238,10)
3	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah	(1.923.327.350,50)	(2.421.933.633,60)

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
a. Ekuitas Awal	1.701.608.020,50	1.786.662.195,10

Saldo ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp. 1.786.662.195,10 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2019 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. 1.701.608.020,50 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2020 *audited*.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	(1.923.327.350,50)	(2.421.933.633,60)

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel 3.27 Surplus/Defisit LO

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Uraian	2020	2021
1	Pendapatan LO	0,00	0
2	Beban	2.400.338.395,50	1.923.327.350,50
3	Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)	- 2.400.338.395,50	- 1.923.327.350,50
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	- 21.595.238,10	0,00
5	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Surplus / Defisit LO (3+4+5)	- 2.421.933.633,60	- 1.923.327.350,50

	31 Desember 2020	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
c. Ekuitas Akhir	1.701.608.020,50	1.652.929.985,00

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 3.26 Laporan Perubahan Ekuitas 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Keterangan	2020	2021
1	Ekuitas Awal	1.786.662.195,10	1.701.608.020,50
2	Surplus (defisit) LO	-2.421.933.633,60	(1.923.327.350,50)
3	Lain-lain: Penyesuaian Ekuitas	0,00	0,00
4	RK PPKD	2.336.879.459,00	1.874.649.315,00
	Ekuitas Akhir	1.701.608.020,50	1.652.929.985,00

BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

A. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah (naskah kuno), bukti (bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa - penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut - turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928 - 1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941 - 1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948 - 1959);
- 4) R. Sukardjono (1959 - 1966);
- 5) N.G. Subowo (1966 - 1973);
- 6) Suwandi (1973 - 1983);
- 7) Karsid (1983 - 1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988 - 1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993 - 1998);
- 10) Drs.H. Achmad Fauzi (1998 - 2003);
- 11) Drs.H. Achmad Fauzi - H. Hartono, SH, S.Sos (2003 – 2008);
- 12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2008 – 2013);
- 13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2013 - 2019);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, MKes (2014 – 2019);

B. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
- 2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.

- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

C. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 112° 5' – 113° 22' Bujur Timur dan 7° 52' – 8° 23' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM² atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas (batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

D. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3(4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu

setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

E. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

F. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) Daerah Pemukiman Seluas 20.721 Ha (11,57%);
- 2) Lahan Sawah Seluas 34.672 Ha (19,36%);
- 3) Tegal Seluas 59.795 Ha (33,39%);
- 4) Perkebunan Seluas 12.109 Ha (6,76%);
- 5) Hutan Seluas 52.303 Ha (29,20%);

6) Dan Lainnya Seluas 1.590 Ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

G. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Dalam periode tahun 2003 – 2007 penataan kembali fungsi (fungsi kelembagaan telah dilakukan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2003 dilakukan penataan berdasarkan PP Nomor 8/2003 dan tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41/2007.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja. Yang pada tahun 2017 telah berganti dengan Struktur Organisasi yang baru. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT.

6.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN PASIRIAN

Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Pasirian

Secara geografis, Kecamatan Pasirian terletak antara 112o 50'-113o 22' Bujur Timur dan 7o 52' – 8o 23' Lintang Selatan. Kecamatan Pasirian terdiri dari :

a) 11 (Sebelas) Desa, yaitu:

1. Nguter
2. Sememu
3. Madurejo
4. Pasirian
5. Kalibendo
6. Bades
7. Gondoruso
8. Bago
9. Selok Anyar
10. Selok Awar awar
11. Condro

b) RT/RW : 105/506

c) Luas Wilayah : 183.91 Km²

d) Jumlah Penduduk : 92.986 Jiwa ; Lk : 46.204 Jiwa ; Pr : 46.782 Jiwa

e) Jumlah Keluarga : 29.389 KK

f) Kepadatan penduduk : 487 Jiwa/Km²

g) Ketinggian : 200 m dari permukaan laut

h) Curah Hujan : 2.615

i) Jumlah hari hujan 1 tahun : 202

j) Desa desa yang berbatasan dengan Laut :

Desa Gondoruso, Desa Bades, Desa Bago, Desa Selok Awar Awar, Desa Selok Anyar.

k) Dilalui oleh 2 Sungai besar aliran Gunung Semeru :

Sungai Regoyo , Sungai Mujur.

- 1) Batas – batas :
- Sebelah utara : Kec. Senduro dan Kec. Candipuro
 - Sebelah Timur : Kec. Tempeh
 - Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
 - Sebelah Barat : Kec. Tempursari dan Kec. Candipuro

PETA ADMINISTRASI KEC.PASIRIAN



BAB VII P E N U T U P

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah SKPD KECAMATAN PASIRIAN tahun anggaran 2021 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan SKPD KECAMATAN PASIRIAN dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Pasirian berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Kecamatan Pasirian
 - e) Kewajiban - kewajiban SKPD Kecamatan Pasirian kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Pasirian pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok SKPD Kecamatan Pasirian tahun 2021 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

- (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
- (5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- (6) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2021
- (7) Serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.